

News Title: Beppebti Upayakan Perbaikan Tata Kelola Perdagangan CPO Indonesia	
Media Name : Waspada Medan	Journalist : okz
Publish Date: 30 November 2023	Tonality : Positive
News Page : A7	News Value : 7,200,000
Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 2,400,000
Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Perdagangan CPO Indonesia

Beppebti Upayakan Perbaikan Tata Kelola Perdagangan CPO Indonesia

JAKARTA (Waspada): Bappebti merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi utama Bappebti adalah pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengembangan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Adapun dasar hukum atas pelaksanaan tugas fungsi tersebut adalah UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, UU No. 32/1997 sebagaimana diubah menjadi UU No. 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 9/2006 yang telah diubah menjadi UU No. 9/2011 tentang Sistem Resi Gudang, dan Perpres No. 75/2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kasan. Ia menyebutkan, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) adalah jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan atau Kontrak Derivatif lainnya.

Sedangkan, komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang menjadi subyek Kontrak Berjangka

dari komoditi yang menjadi subyek Kontrak Berjangka. Berbagai komoditas di Indonesia dapat menjadi subyek kontrak berjangka salah satu yang potensial adalah CPO. CPO merupakan komoditas strategis Indonesia dengan total produksi mencapai 45,5 juta metrik ton dengan total ekspor sebesar 26,2 juta metrik ton atau senilai USD29.656 juta pada 2022.

Sampai saat ini, produksi maupun ekspor CPO Indonesia masih tertinggi dibanding negara-negara lain di dunia. Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia.

Pada periode Januari - September 2023 ekspor CPO Indonesia sebesar 19,56 juta metrik ton atau senilai USD17.302 juta dengan tiga negara tujuan ekspor terbesar yaitu India, Tiongkok, dan Pakistan.

Disampingitu, CPO pentinguntuk dikembangkan karena berkontribusi cukup besar dalam menghasilkan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja, CPO dimanfaatkan untuk sumber energi pembangkit listrik maupun Bahan Bakar Minyak (BBM), CPO merupakan bahan baku industri minyak goreng, margarin, shortening dan lainnya, CPO juga mendukung pengembangan industri kelapa sawit yang akan menghasilkan lebih dari 100 produk hilir.

Meskipun CPO memegang peranan penting di Indonesia, namun sampaisaatini hargadalam transaksi CPO masih mengacu pada Rotterdam dan Bursa Malaysia. Oleh karena itu, Bappebti mengambil peran dalam upaya perbaikan tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui pembentukan harga acuan (price reference) CPO.

Halini juga selaras dengan UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan harga acuan komoditi yang transparan melalui Bursa Berjangka.

Kebijakan pemerintah (Bappebti) dalam upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Sebagai tindak lanjutnya, Oktober 2023 lalu pemerintah membentuk Bursa CPO Indonesia yang telah diresmikan oleh Menteri Perdagangan.

Bursa CPO Indonesia saat ini mengatur perdagangan pasar fisik dan futures CPO di Bursa Berjangka yang ditetapkan pemerintah Indonesia. (okz)